BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2021

Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota sangat urgen dan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan kewilayahan serta menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah.

Evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dilakukan melalui pendekatan capaian indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), (3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan (4) Persentase Penduduk Miskin.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya pembangunan mutu modal manusia di suatu daerah/wilayah. Berdasarkan analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota tahun 2021, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Ketegori Capaian IPM Kabupaten/Kota

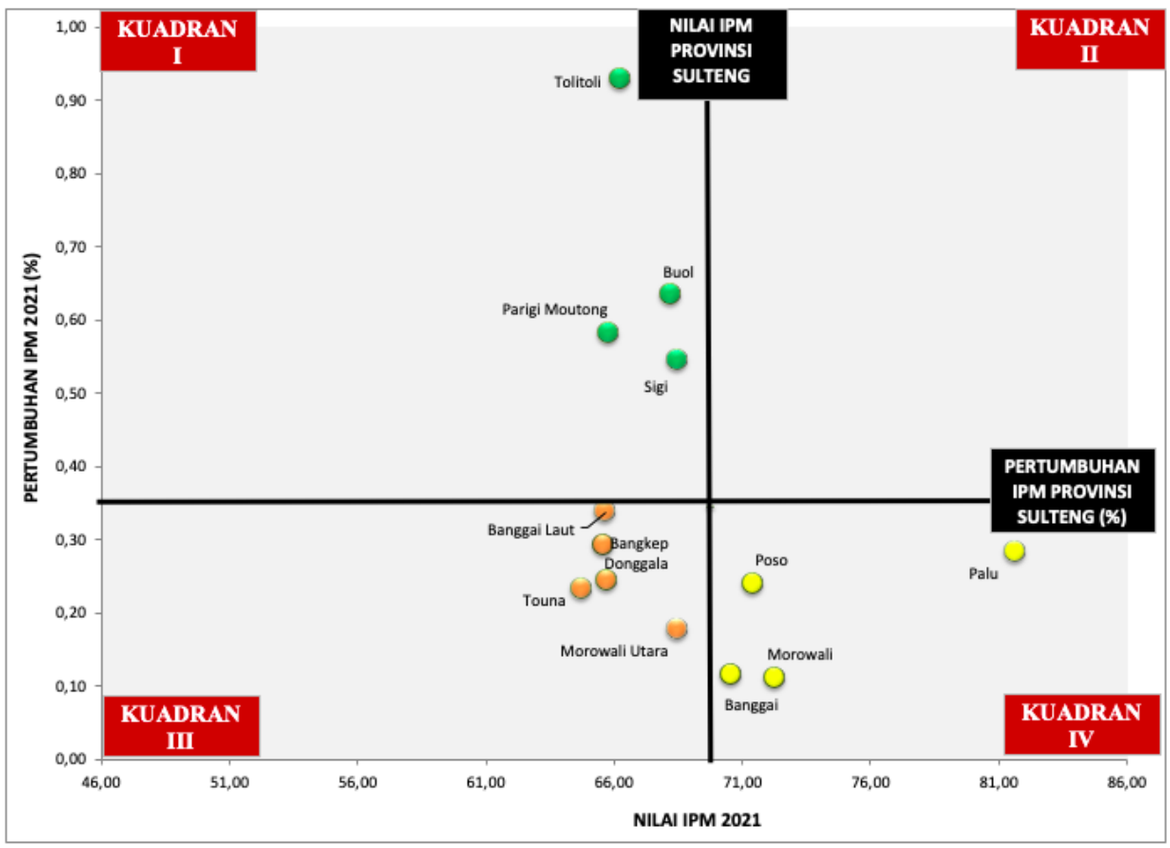
KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM **LEBIH RENDA** dan Laju Pertumbuhan IPM **LEBIH TINGGI** dibanding capaian Provinsi Sulteng
II		Kelompok Kabupaten/kota dengan capain IPM dan Laju Pertumbuhan IPM **LEBIH TINGGI** dibanding capaian Provinsi Sulteng
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan laju Pertumbuhan IPM **LEBIH RENDAH** dibanding capaian Provinsi Sulteng
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM **LEBIH TINGGI** dan Laju Pertumbuhan IPM **LEBIH RENDAH** dibanding capaian Provinsi Sulteng

Sumber: BPS, Data Diolah Kembali Bappeda Provinsi Sulteng, 2022.

Berdasarkan kategori tipologi tersebut dan hasil capaian indikator IPM Kabupaten/Kota tahun 2021, maka klasifikasi kabupaten/kota dapat kelompokan sebagai barikut:

- **Kuadran I**, pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.
- **Kuadran II**, pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tengah.
- **Kuadran III**, pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Morowali Utara.
- **Kuadran IV**, Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali.

Selanjutnya, secara detail klasifikasi tipologi kabupaten/kota berdasarkan capaian indikator IPM dapat disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Data Diolah Kembali Bappeda Provinsi Sulteng, 2022.

Gambar 5.1
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021

Pencapaian pembangunan mutu modal manusia yang direflekasikan melalui indikator IPM kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 sangat bervariasi. Urutan IPM terendah berada di Kabupaten Tojo Una-Una (64,74), sedangkan tertinggi terdapat di Kota Palu (81,70). Satu-satunya Kabupaten/Kota dengan status capaian pembangunan manusia "sangat tinggi" (IPM ≥ 80) yaitu Kota Palu. Jumlah Kabupaten/Kota dengan status capaian "tinggi" (70 ≤ IPM < 80) sebanyak 3 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Morowali, Poso, dan Banggai. Sementara itu, 9 Kabupaten/Kota lainnya masih berstatus "sedang" (capaian 60 ≤ IPM < 70). Hal ini mengindikasikan bahwa masih adanya kesenjangan status capaian pembangunan mutu modal manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.



Sumber: BPS, Data Diolah Kembali Bappeda Provinsi Sulteng, 2022.

Gambar 5.2
Capaian dan Status IPM Kabupaten/Kota Tahun 2021

Dalam rangka mengurangi disparitas dan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan mutu modal manusia di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah diperlukan upaya akselerasi dan sinergitas percepatan pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa strategi kebijakan yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan pembangunan SDM kedepan antara lain:

- Mendorong peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya (jasmani dan rohani), maupun peningkatan kualitas kehidupan (perumahan dan pemukiman yang sehat);

- Mendorong peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya;
- Mendorong peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan penguasaan IPTEK yang berwawasan lingkungan.
- Mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah guna meningkatkan konektivitas antar wilayah, sehingga berimplikasi terhadap terjadinya pemerataan dan perbaikan kualitas SDM disetiap wilayah.

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan analisis kuadran terhadap capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten/kota tahun 2021, maka capaian LPE kabupaten/kota dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Ketegori Capaian LPE Kabupaten/Kota

KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE **LEBIH RENDAH** dan Rata-rata LPE **LEBIH TINGGI** dibanding capaian Provinsi Sulteng
II		Kelompok Kabopaten/Kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE **LEBIH TINGGIH** dibanding capaian Provinsi Sulteng
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dengan Rata-rata LPE **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi Sulteng
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capain LPE **LEBIH TINGGI** dan Rata-rata LPE **LEBIH RENDAH** dibanding capaian Provinsi Sulteng

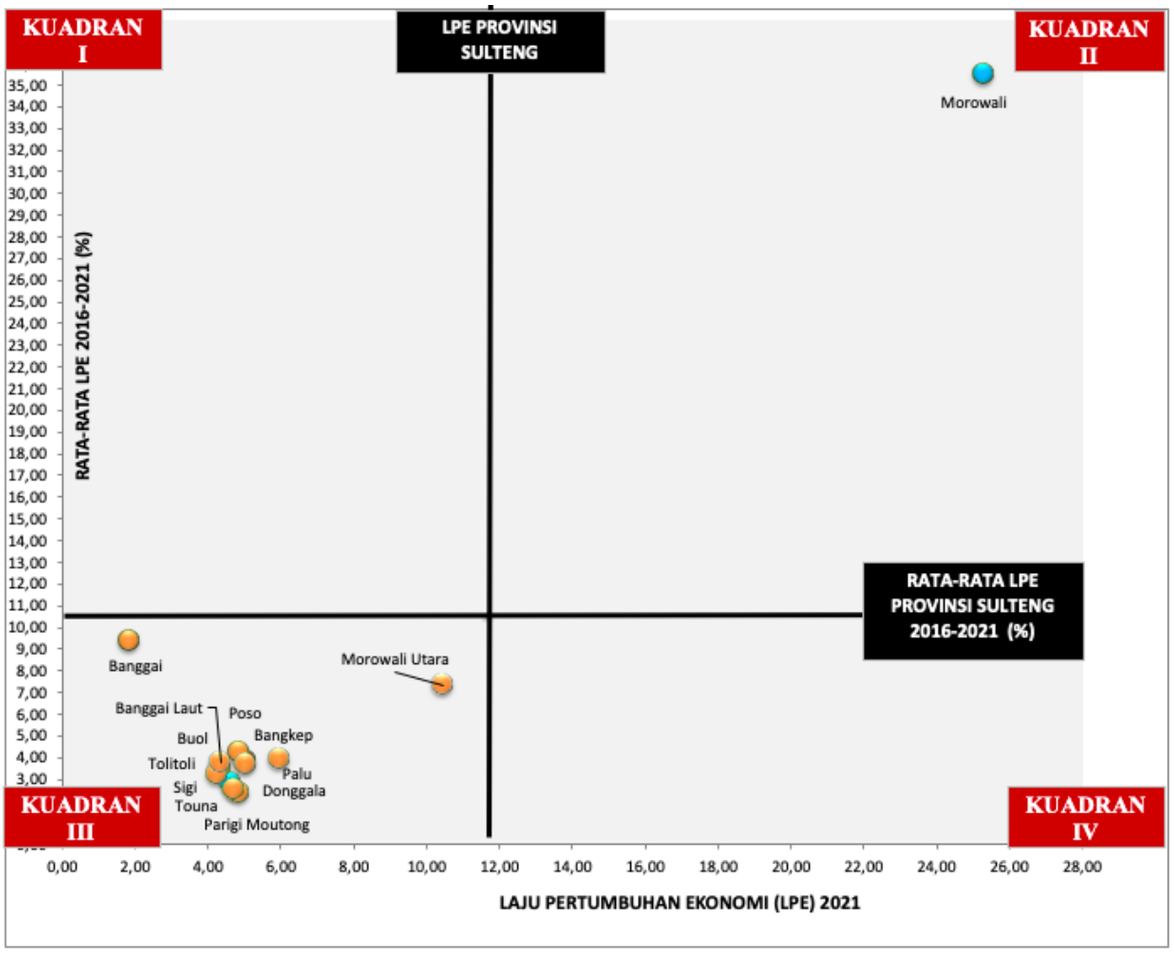
Sumber: BPS, Data Diolah Kembali Bappeda Provinsi Sulteng, 2022.

Berdasarkan kategori tipologi tersebut dan hasil capaian indikator LPE Kabupaten/Kota tahun 2021, maka klasifikasi kabupaten/kota dapat kelompokan sebagai barikut:

- **Kuadran I**, pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tengah.

- **Kuadran II**, pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Morowali.
- **Kuadran III**, pada kelompok ini terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Palu.
- **Kuadran IV**, Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, secara detail klasifikasi tipologi kabupaten/kota berdasarkan capaian indikator LPE disajikan pada gambar berikut ini.



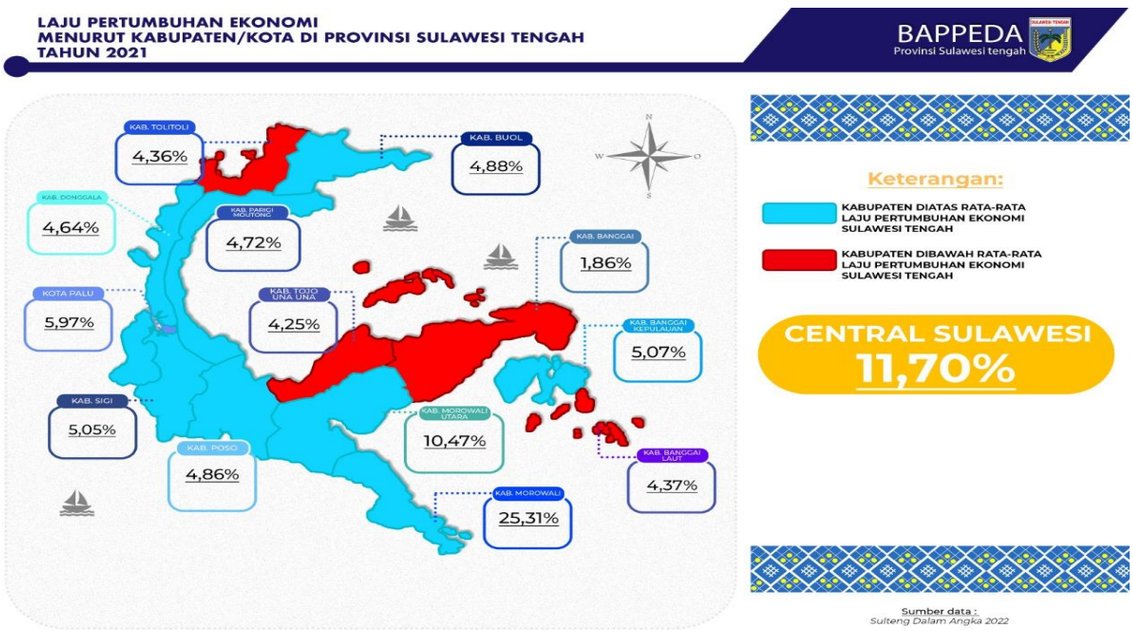
Sumber: BPS, Data Diolah Kembali Bappeda Provinsi Sulteng, 2022.

Gambar 5.3
Analisis Kuadran LPE dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota Tahun 2021

Capaian kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tidak lepas dari peran dan capaian kinerja pembangunan ekonomi

kabupaten/kota. Laju pertumbuhan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (trend positif). Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah menunjukkan besaran yang cukup bervariasi dari -4,95 persen sampai dengan 28,51 persen. Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Morowali yaitu 28,51 persen, kemudian diikuti Kabupaten Morowali Utara sebesar -0,23 persen, dan yang terkecil adalah Kabupaten Parigi Moutong dengan pertumbuhan sebesar -4,95 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Morowali pada tahun 2020 didukung oleh tingginya pertumbuhan pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 35,25 persen, sedangkan di Kabupaten Morowali Utara didukung oleh tingginya pertumbuhan pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,69 persen. Selain dua kabupaten tersebut, pertumbuhan kabupaten/kota mengalami penurunan karena adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia. Namun, pada tahun 2021, pandemi mulai membaik, jumlah kasus positif terpapar virus sudah menurun cukup signifikan sehingga kegiatan ekonomi juga ikut membaik.

Selanjutnya, pada tahun 2021 seluruh kabupaten/kota mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yang semula pada tahun 2020 hampir semua kabupaten/kota megalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 adalah kabupaten Morowali sebesar 25,31 persen, sedangkan terendah berada di Kabupaten Banggai sebesar 1,86 persen. Tingginya pertumbuhan Kabupaten Morowali disebabkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 20,01 persen.



Selanjutnya, dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas lokasi pembangunan kewilayahan dalam rangka pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan kawasan. Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah yaitu dengan rencana pembangunan Kawasan Pangan Nusantara dan food estate di beberapa wilayah Kabupaten, sekaligus juga untuk mendukung kebutuhan pangan bagi Ibu Kota negara Nusantara ke depan.

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan seberapa besar angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja (pasar kerja). Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2021, maka capaian TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3
Ketegori Capaian TPT Kabupaten/Kota

KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan Capaian TPT **LEBIH RENDAH** dibanding capaian Provinsi Sulteng dan lanjut Perubahan TPT **DIATAS** capaian Provinsi Sulteng
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT **LEBIH TINGGI** dibanding capaian Provinsi Sulteng dan Laju Perubahan TPT **DIATAS** capain Provinsi Sulteng
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT **LEBIH RENDAH** dibanding capaian Provinsi Sulteng dan laju Perubahan TPT **DIBAWAH** capaian Provinsi Sulteng
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT **LEBIH TINGGI** dibanding capaian Provinsi Sulteng dan Laju Perubahan TPT **DIBAWAH** capaian Provinsi Sulteng

Sumber: BPS, Data Diolah Kembali Bappeda Provinsi Sulteng, 2022.

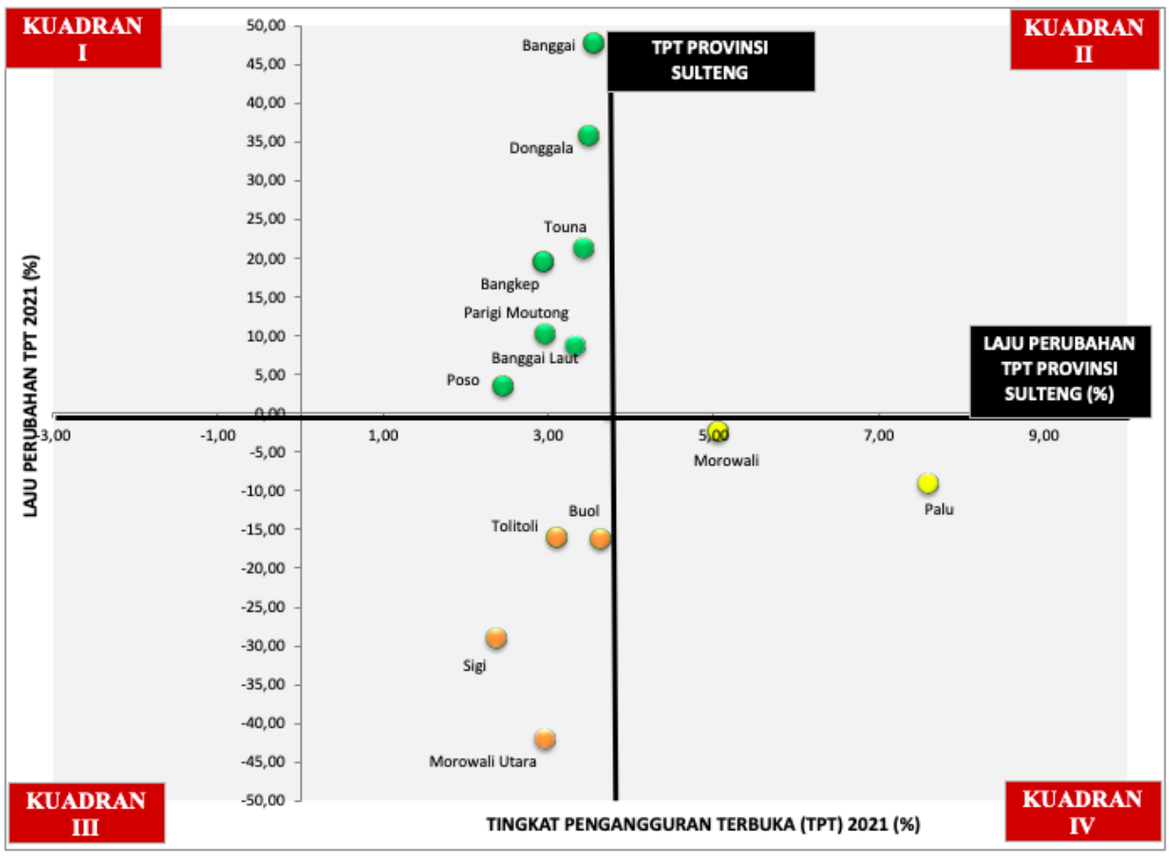
Berdasarkan kategori tipologi tersebut dan hasil capaian indikator TPT Kabupaten/Kota tahun 2021, maka klasifikasi kabupaten/kota dapat kelompokan sebagai barikut:

- **Kuadran I**, pada kelompok ini terdapat 7 (tujuh) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Sulteng dan Laju Perubahan TPT diatas capaian Provinsi Sulteng, yaitu Kabupaten Banggai,

Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Poso.

- **Kuadran II**, pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulteng dan Laju Perubahan TPT diatas capaian Provinsi Sulteng.
- **Kuadran III**, pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulteng dan Laju Perubahan TPT dibawah capaian Provinsi Sulteng, yaitu Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Morowali Utara.
- **Kuadran IV**, pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulteng dan Laju Perubahan TPT di bawah capaian Provinsi Sulteng, yakni Kabupaten Morowali dan Kota Palu.

Selanjutnya, secara detail klasifikasi tipologi kabupaten/kota berdasarkan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Data Diolah Kembali Bappeda Provinsi Sulteng, 2022.

Gambar 5.4
Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2021 menunjukkan tren perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 13 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 61 - 74 persen, dengan TPAK tertinggi berada di Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 74,86 persen dan TPAK terendah berada di Kabupaten Banggai Laut sebesar 61,42 persen. Sementara dari sisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021, TPT tertinggi berada di Kota Palu sebesar 7,61 persen dan TPT terendah berada di Kabupaten Sigi sebesar 2,38 persen.

Pada umumnya, permasalahan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum dimbangi dengan penciptaan dan pengembangan lapangan kerja yang memadai, dengan lain perkataan daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Sehubungan dengan hal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja (dunia usaha dan dunia industri). Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten dibutuhkan dalam upaya mendorong dan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyakarat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2021, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana yang tertera pada tabel di berikut ini.

Tabel 5.4
Ketegori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

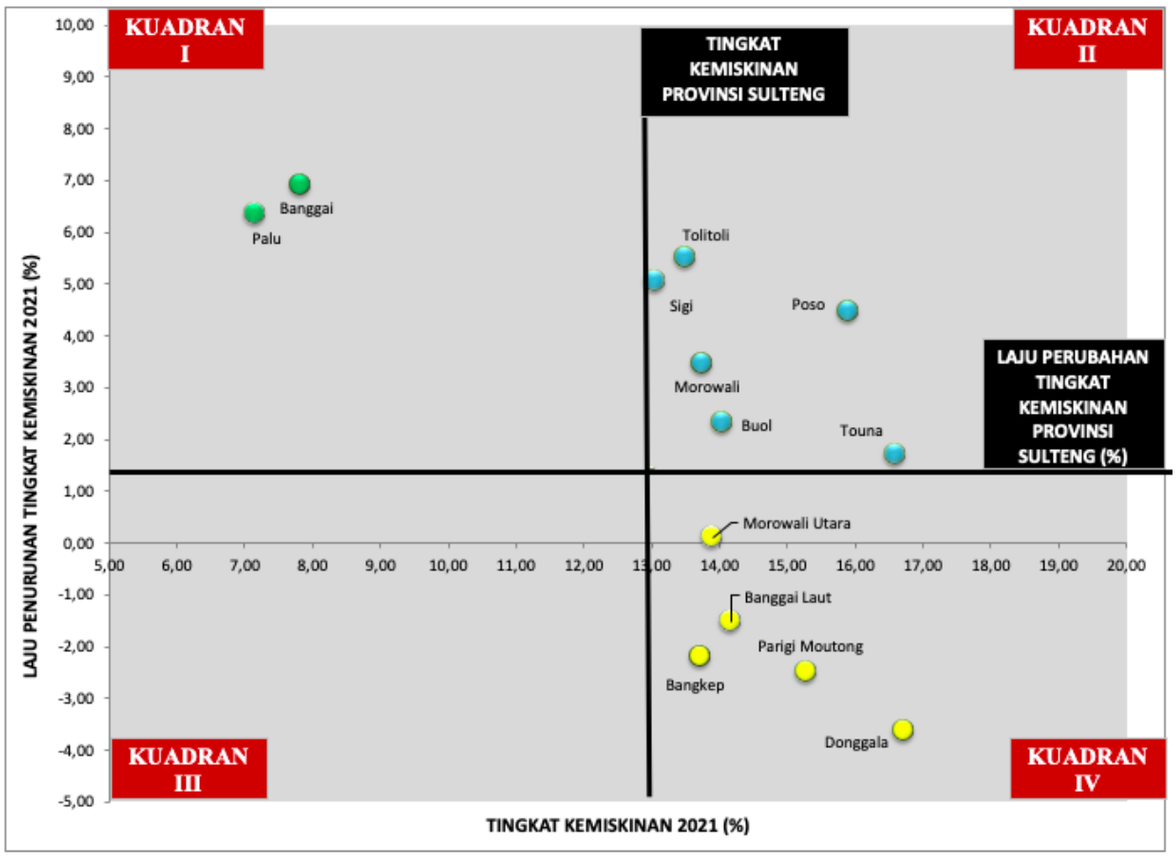
KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan Capaian Persentase Penduduk Miskin **LEBIH RENDAH** dan lanju Penurunan lebih **TINGGI** dibanding capaian Provinsi Sulteng.
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan **LEBIH TINGGI** dibanding capaian Provinsi Sulteng.
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan **LEBIH RENDAH** dibanding capaian Provinsi Sulteng.
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin **LEBIH TINGGI** dan Laju Penurunan **LEBIH RENDAH** dibanding capaian Provinsi Sulteng.

Sumber: BPS, Data Diolah Kembali Bappeda Provinsi Sulteng, 2022.

Berdasarkan kategori tipologi tersebut dan hasil capaian indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota tahun 2021, maka klasifikasi kabupaten/kota dapat kelompokan sebagai barikut:

- **Kuadran I**, pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dan laju penurunan kemiskinan lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulteng, yaitu Kabupaten Banggai dan Kota Palu.
- **Kuadran II**, pada kelompok ini terdapat 6 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan kemiskinan lebih tinggi dibanding capaian Provinsi Sulteng, yaitu Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol dan Kabupaten Tojo Una-Una.
- **Kuadran III**, pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan laju penurunan kemiskinan lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulteng.
- **Kuadran IV**, pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dan Laju Penurunan kemiskinan lebih rendah dibanding capaian Provinsi Sulteng, yaitu Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala.

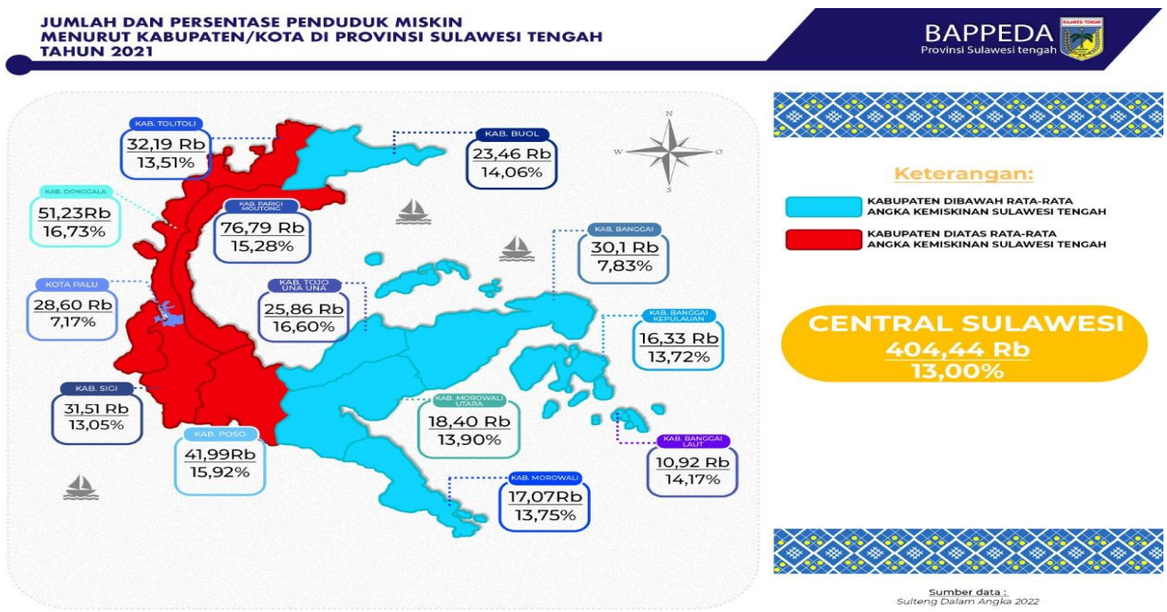
Selanjutnya, secara detail klasifikasi tipologi kabupaten/kota berdasarkan capaian indikator Tingkat Kemiskinan disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS, Data Diolah Kembali Bappeda Provinsi Sulteng, 2022.

Gambar 5.5
Analisis Kuadran Capaian dan Laju Penurunan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota

Persoalan dan karakteristik kemiskinan di kabupaten/kota menujukkan tren yang fluktiatif. Sebagian besar tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten/kota masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang relatif lebih rendah, dengan kantong-kantong kemiskinan wilayah didominasi di kawasan perdesaan.



Dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan, pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meluncurkan sebuah program Inovasi Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) Provinsi Sulawesi Tengah akan diluncurkan. Ini merupakan salah satu upaya membantu masyarakat miskin dengan memberikan bantuan guna memenuhi sarana produksi yang menunjang pekerjaan penghasilan utama mereka, dengan harapan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan mempersempit jarak persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah melalui penguatan ekonomi bagi rumah tangga miskin melalui: (1) peningkatkan kemampuan dan ketrampilan usaha ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan; (2) Memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pemberian dan peningkatan peluang-peluang ekonomi; serta mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat berskala mikro dan kecil; (3) Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Lingkup Program Gercep Gaskan Berdaya berlokasi di 12 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dengan sasaran adalah Rumah tangga miskin Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Program Gercep Gaskan Berdaya adalah kegiatan yang memiliki arti penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang diusulkan melalui mekanisme partisipasi aktif masyarakat (*Forum Group Disussion*, Musyawarah Desa dan Musyawarah lainnya), dengan focus menunjang mata pencaharian utama masyarakat miskin. Impementasi kegiatan dalam program ini dilaksanakan selama satu tahun anggaran dan disinergikan dengan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing wilayah kabupaten/kota.

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Kebijakan pembangunan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Kualitas pendidikan melalui program pendidikan vokasi;
   Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Disamping itu pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan agen perubahan dalam meningkatkan ketahanan, dan daya saing masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk mencapai tujuan tersebut pendidikan vokasi peru diposisikan dalam kerangka *Vocational Education for All* (VoEFA) yang terdiri dari 9 pilar: (1) Keluarga sadar vokasi; (2) Pendidikan vokasi sejak dini; (3) Pendidikan vokasi dalam lingkup jalur pendidikan (formal, non formal, informal), pelatihan, dan pengalaman kerja; (4) Pendidikan vokasi yang ramah dan layak bagi kaum difable; (5) Pendidikan vokasi responsif gender; (6) Pendidikan vokasi sebagai pemandu pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa; (7) Pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, prediktif, dan fleksibel terhadap perubahan, dinamika sosial dan perkembangan IPTEKS; (8) Pendidikan vokasi berbasis mutu; dan (9) Kolaborasi terpadu dan saling menguntungkan antar siswa (lulusan), dunia usaha/dunia industri (Du/Di), pemerintah, dan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi tengah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan Pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing, menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas, melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan dan mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing serta memberikan bantuan Pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
2. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat secara konsisten guna menurunkan angka stunting, penderita gizi buruk, layanan kesehatan, germas, dan lain-lain);
   Pembangunan dibidang kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia yang diatur dalam system kesehatan nasional (SKN). Dijelaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah terselanggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna, dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Secara substansi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya secara optimal dalam membangun derajat

kesehatan masyarat melalui sinergitas kebijakan pembangunan kesehatan yang diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu kebijakan Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitas dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan, serta mengembangkan system jaminan gizi dan tumbuh kembang anak di perkotaan, perdesaan dan wilayah terpencil untuk memastikan penurunan angka stunting dan penurunan angka kematian ibu dan balita di prvoinsi Sulawesi Tengah.

3. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah;

   Kebijakan pembangunan bidang ekonomi diarahkan pada peningkatan sector industry dengan didukung oleh sector pertaninan yang tangguh. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan daerah di sector pertanian dan perkebunan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis. Pembangunan di sector pertanian menjadi lebih penting disebabkan sebagian besar wilayah Sulawesi Tengah merupakan daerah pertanian dan mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam/berkebun dan nelayan. Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah yaitu dengan rencana pembangunan Kawasan Pangan Nusantara dan food estate di beberapa wilayah Kabupaten, sekaligus juga untuk mendukung kebutuhan pangan bagi Ibu Kota negara Nusantara ke depan.

4. Mewujudkan pemerataan penyediaan air bersih terutama pada daerah terdampak bencana;

   Penyediaan air bersih di wilayah Provinsi Sulawesi tengah masih menjadi permasalahan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Berdasarkan agenda Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum yaitu 100 persen akses air minum, maka Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah melakukan kebijakan dalam peningkatan kualitas penyediaan air bersih bagi masyarakat melalui program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum bagi masyarakat termasuk pada wilayah terdampak bencana.

5. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan;

   Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah dalam peningkatan sarana prasarana Pendidikan dan kesehatan melalui pleyanan

public bidang Pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi infromasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital melalui system Pendidikan untuk mendukung kesiapan tenaga kerja dalam era industry 4.0 melalui fasilitas literasi digital pada masyarakat dan talenta digital.

6. Melanjutkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022.

5.3 Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota dalam RKPD Tahun 2023, ditetapkan berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bersifat makro yang telah di uraikan sebelumnya. Analisis terhadap capaian indikator makro digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Target pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah diukur dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi maupun dengan berkolaborasi dan bersinergi dengan kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan (*stakeholder)* lainnya, baik masyarakat maupun dunia usaha. Kinerja pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah selain diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), juga diukur dengan pencapaian Indikator Kinerja Makro. Target indikator makro yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yakni Indikator IPM, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan Indeks Gini.

Guna mewujudkan sinergitas perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka ditetapkan arahan target indikator kinerja makro Tahun 2023 setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja makro pembangunan kabupaten/kota yang telah diuarai sebelumnya, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan indikator makro kabupaten/kota dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5
Proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2023

NO	KABUPATEN/ KOTA	TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2023				
		LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	TINGKAT PENGANG-GURAN TERBUKA (%)	INDEKS GINI (POIN)	IPM (POIN)
1	Banggai Kepulauan	2,84	11,99	2,26	0,33	67,39
2	Banggai	4,37	6,08	2,24	0,30	72,65
3	Morowali	53,27	10,47	4,69	0,30	74,39
4	Poso	3,68	12,52	2,20	0,30	73,43
5	Donggala	1,80	14,21	2,36	0,32	67,54
6	Tolitoli	2,99	11,07	3,34	0,36	67,67
7	Buol	1,59	12,41	3,82	0,34	69,87
8	Parigi Moutong	1,25	12,98	2,49	0,30	67,42
9	Tojo Una-Una	2,52	13,60	2,58	0,30	66,54
10	Sigi	2,95	10,47	2,99	0,30	70,18
11	Banggai Laut	2,56	12,29	2,80	0,30	67,40
12	Morowali Utara	7,25	11,59	4,69	0,30	70,42
13	Kota Palu	2,95	5,19	6,79	0,35	83,93

Kebijakan pembangunan kabupaten/kota merupakan arahan atau fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan Provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2023.

Kebijakan pembangunan kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi, serta capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan kemajuan pembangunan antar daerah yang bersumber dari berbagai aspek, antara lain yaitu: (a) faktor perbedaan kepemilikan sumber daya pembangunan, (b) kapasitas fiskal daerah, (c) sumber daya manusia dan daya saing, serta (d) capaian kinerja pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan prioritas pembangunan provinsi Tahun 2022, yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan antar daerah, baik pada aspek sumber daya manusia, aspek ekonomi dan aspek ketersediaan infrastruktur. Oleh karena itu, arah

kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota diuraikan sebagai berikut.

a. Prioritas 1: Pemerataan Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing melalui pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah; (b) Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah; (c) Pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi mata pelajaran/bidang studi; (d) Beasiswa bagi siswa yang berprestasi tetapi kurang mampu dan melanjutkan pendidikan bagi anak putus sekolah, dan (e) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan komptensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha, juga untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota yang capaian indeks pendidikan/pengetahuannya masih di bawah rata-rata indeks pendidikan/ pengetahuannya Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Prioritas 2: Desentralisasi Layanan Kesehatan secara merata

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing, terutama bagi masyarakat kurang mampu; (b) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan; (c) Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga kesehatan sampai pada pelayanan tingkat pertama (Puskesmas); (d) Meningkatkan status gizi masyarakat guna menurunkan angka stunting dan menekan angka kamtian ibu dan bayi, (e) Mendorong kemandirian masyarakat yang mampu dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan prioritas ini dimaksudkan disamping untuk penangan dampak pandemi Covid-19, juga untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota yang capaian indeks kesehatannya masih rendah. Keberpihakan program diarahkan kepada kabupaten/kota yang memiliki AHH di bawah rata-rata AHH provinsi.

c. Prioritas 3: Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin dan terdampak bencana; (b) Meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat miskin; (c) Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana; (d) Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin; (e) Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar; dan (f) Mengembangkan inkubator bisnis melalui kemitraan. Langkah konkrit yang harus dilakukan, yaitu melalui pelayanan kesehatan untuk warga kurang mampu, sekolah gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

d. Prioritas 4: Digitalisasi pelayanan publik dan Tata kelola Pemeritahan

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk kabupaten/ kota difokuskan pada upaya: (a) Memperkuat kelembagaan, tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan informasi (digitalisasi pelayanan publik) dan peningkatan kompetensi aparatur; (b) Meningkatkan koordinasi dan sikronisasi perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi antar tingkat pemerintahan; (c) Mendukung pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB guna optimalisasi pelayanan publik. Secara keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah didorong untuk memberikan pelayanan yang optimal dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik.

e. Prioritas 5: Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis Sektor Unggulan

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia; (b) Menguatkan kelembagaan ekonomi kerakyatan dan UMKM dalam pengelolaan sektor unggulan daerah, (c) Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan; (d) Mengembangkan unit pengelolaan hutan rakyat lestari dan meningkatkan akses pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial; dan (e). Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar.

Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota yang memiliki capaian indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan relatif masih rendah. Selain itu, arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kinerja perekonomian

kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya lebih lambat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Upaya konkrit dalam mewujudkan peningkatan daya beli dan ekonomi adalah kabupaten/kota setempat memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal untuk pengembangan pusat perekonomian baru, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, serta menjamin ketahanan pangan melalui kontinuitas distribusi dan ketersediaanya.

f. Prioritas 6: Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penyediaan Infrastruktur

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif; dan (b) Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sektor Pariwisata, (c) Meningkatkan promosi pariwisata berbasis digital, dan (d) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan Pariwisata.

g. Prioritas 7: Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Arah kebijakan pembangunan provinsi untuk kabupaten/kota difokuskan pada upaya: (a) Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok; (b) Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial; (c) Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau antar moda; (d) Mengembangkan prasarana transportasi darat, laut, udara, dan Angkutan Penyeberangan (ferry) yang memperhatikan aspek keselamatan dan menghubungkan wilayah strategis; (e) Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara; (f) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang; (g) Meningkatkan upaya pengelolaan limbah domestik, serta kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan (i) Meningkatkan pola hidup sehat dalam menciptakan kelastarian lingkungan hidup. Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Tahun 2023, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Sebagai bentuk upaya dalam mengoptimalkan pengembangan wilayah di 13 kabupaten/kota, maka ditetapkan beberapa arah pengembangan wilayah untuk masing-masing kabupaten/kota tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kabupaten Banggai

- Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, IKM dan Koperasi serta sektor perdagangan;
- Mengoptimalkan Pengembangan potensi pariwisata daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Meningkatkan Ketahanan Pangan daerah melalui Peningkatan produksi dan nilai tambah sektor Pertanian, perikanan dan Kelautan serta Implementasi Kartu Petani dan Kartu Nelayan Sejahtera secara optimal;
- Menurunkan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran akibat dampak Covid 19;
- Pemerataan Akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
- Pemulihan dampak Pandemi Covid 19, melalui penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan *social safety net* serta persiapan daerah menghadapi era New Normal;
- Meningkatkan Aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui;
- Meningkatkan Akses dan kualitas layanan perumahan, air minum dan sanitasi layak;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- Penataan Ruang, Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

2. Kabupaten Banggai Laut

- Mengoptimalkan pengawasan pengelolaan kawasan perikanan;
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
- Meningkatkan kapasitas SDM pelaku perikanan tangkap;
- Meningkatkan ekosistem dan ekologi akibat *ilegal fishing;*
- Meningkatkan penyediaan data sistem informasi sumber daya kelautan yang akurat dan mudah diakses masyarakat;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang kepariwisataan;
- Mengoptimalkan promosi dan pemasaran pariwiswata;

- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang belum memadai;
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengembangan jejaring usaha pertanian;
- Meningkatkan peran kelembagaan petani serta kelembagaan usaha;
- Meningkatkan Kapasitas SDM dalam pengelolaan hutan;
- Mengoptimalkan tata niaga pertanian;
- Meningkatkan Mutu hasil perkebunan melalui perbaikan penanganan pasca panen;
- Meningkatkan peran koperasi melalui pendampingan, penguatan kelembagaan koperasi dan akses permodalan;
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan;
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasaranan insentif investasi;
- Peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus;
- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK
- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SMA/SMK
- Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah SMA/SMK
- Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
- Menurunkan kasus gizi buruk dan gizi kurang
- Menurunkan kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular
- Menurunkan angka/kasus stunting
- Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
- Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit daerah
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku pola hidup sehat dan menjaga
- Masih rentannya konflik sosial dan kerelawanan sosial dimasyarakat
- Mengoptimalkan penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, serta perlingungan jaminan sosial
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kemandirian perempuan
- Masih tingginya kasus anak yang berhadapan dengan hukum
- Masih terbatasnya lapangan kerja yang tercipta
- Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki
- Belum optimalnya revitalisasi dan pengembangan budaya dan situs bersejarah

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan
- Meningkatkan kuantitas moda trasportasi yang menghubungkan antar pulau
- Mengoptimalkan pengendalian dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan mitigasi bencana
- Meningkatkan pemerataan askses dalam bidang komunikasi dan informatika
- Mengoptimalkan suplai energi dari jaringan listrik PLN pada desa/dusun di daerah pedesaan, terpencil dan terluar
- Meningkatkan kualitas permukiman untuk mengatasi tumbuhnya daerah kumuh di perkotaan
- Menyediakan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kabupaten Baggai Laut
- Mempertajam usulan alokasi Tranfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD)/Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan lokus dan permasalahan daerah.

3. Kabupaten Banggai Kepulauan

- Optimalisasi penataan kelompok usaha disektor perikanan, pertanian untuk penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan sumberdaya baik sebagai sumber mata pencaharian
- Mengembangkan UMKM dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian dan perikanan.
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Menurunkan angka kemiskinan terutama masyarakat kelompok petani dan nelayan
- Meningkatkan pemerataan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
- Reformasi Birokrasi dan penerimaan kopentensi guru yang disesuaikan kebutuhan dan kualitas guru
- Meningkatkan Penyediaan sarana prasarana pelayanan masyarakat dan tenaga kesehatan yang memadai guna kebutuhan masyarakat khususnya bagai masyarakat pedesaan
- Pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata di daerah secara maksimal

- Belum meratanya disrtribusi pemerataan pembangunan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif
- Akselerasi Reformasi birokrasi yang tercermin pada pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan pencatatan sipil.
- Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan; sinkronisasi antara kebutuhan dan kualitas guru dalam penguasaan teknologi digital
- Meningkatkan kualitas Sarana, prasarana dan pemeratan aksesibilitas pelayanan kesehatan
- Mengoptimalkan pengelolaan serta penyediaan sarana dan prasarana pariwisata
- Menurunkan angka stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan
- Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan akses masyarakat pedesaan terhadap air bersih yang layak
- Mengoptimalkan Pelabuhan Salakan
- Meningkatkan kualitas dan kemantapan jalan provinsi di Kabupaten Banggai Kepulauan
- Mengoptimalkan pencapaian target fasilitas rumah layak huni bagi masyarakat
- Mengoptimalkan Penanganan Mitigasi Bencana

4. Kabupaten Morowali Utara

- Rendahnya daya saing daerah dan kualitas SDM;
- Masih adanya wilayah kerawanan pangan;
- Meningkatkan nilai dan realisasi investasi;
- Pengentasan kemiskinan daerah;
- Masih Tingginya angka Kemiskinan (15,08%) di atas angka rata-rata provinsi dan nasional;
- Meningkatkan penyerapan tenaga kerja local;
- Meningkatkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Mengoptimalkan pencegahan dan penanganan Pandemi covid 19;
- Meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur;
- Meningkatkan pembangunan antarwilayah dan penataan ruang untuk pemerataan;

- Menurunnya kualitas lingkungan hidup serta rendahnya peran serta masyarakat dalam menjaga kondisi lingkungan;
- Meningkatkan pengelolaan daerah Rawan Bencana;
- Meningkatkan akses komunikasi dan informasi;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur layanan dasar terutama akses air minum.

5. Kabupaten Morowali

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sektor industri tambang);
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi;
- Peningkatkan kualitas SDM tenaga kerja;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana gempa bumi dan banjir.
- Peningkatan kawasan industri prioritas dan smelter.
- Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan perikanan.

6. Kabupaten Tojo Una-Una

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pariwisata dan perikanan kelautan);
- Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi (, Pertanian, Pariwisata) dengan pusat distribusi (terminal, Stasiun, Bandara, Pelabuhan);
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;

- Pengembangan kegiatan ekonomi sector pertanian dan perikanan kelautan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana gempa bumi dan banjir.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

7. Kabupaten Tolitoli

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana gempa bumi;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;

8. Kabupaten Buol

- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;

- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana banjir;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

9. Parigi Moutong

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan (sektor pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Penguatan mitigasi bencana, percepatan pemulihan pasca bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan.

10. Kabupaten Poso

- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;

- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pengendalian zona rawan bencana.

11. Kabupaten Sigi

- Penguatan mitigasi bencana, percepatan pemulihan pasca bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan;
- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

12. Kabupaten Donggala

- Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam pengembangan kawasan yang mampu mendorong sektor unggulan;
- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sector unggulan (sector pertanian, perkebunan dan peternakan);
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Pemenuhan kebutuhan air bersih, akses sanitasi dan persampahan;
- Penguatan mitigasi bencana, percepatan pemulihan pasca bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan;

- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur layanan dasar terutama akses air minum.

13. Kota Palu

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui sektor unggulan (sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial);
- Pengembangan kegiatan ekonomi sektor potensial;
- Peningkatan aksesibilitas dalam rangka mendukung konektivitas antar daerah yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat distribusi (terminal, pelabuhan, bandara);
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan vokasional;
- Penguatan mitigasi bencana, percepatan pemulihan pasca bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan;
- Peningkatan kerjasama antar daerah (KAD) dalam pengembangan Kawasan yang mampu mendorong sector unggulan;
- Peningkatan kualitas infrastruktur daerah;
- Pemenuhan akses terhadap penanganan persampahan wilayah perkotaan;
- Peningkatan kawasan perkotaan sedang untuk mendukung sektor industri dan pariwisata;
- Peningkatan kapasitas hukum hak atas tanah dalam Kawasan Ekonomi Khusus Palu;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur layanan dasar terutama akses air minum.